

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat 38 provinsi, 7.277 Kecamatan, 514 Kota/Kabupaten, dan 83.763 Desa/Kelurahan di Republik Indonesia. “Desa ialah kesatuan rakyat aturan yang memiliki batas daerah serta berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa masyarakat, hak dari usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” sesuai Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 perihal pelaksanaan Undang-Undang Desa nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 angka (1) (Peraturan.bpk.go.id, 2014a).

Desa pada umumnya diartikan oleh penduduk setempat sebagai komunitas orang-orang yang tinggal disana. Mereka dibedakan berdasarkan aksen daerah yang kuat dalam penggunaan tata bahasanya, tingkat pendidikan yang umumnya rendah, dan fakta bahwa sebagian besar penduduknya bekerja atau bekerja dibidang pertanian (Putriansyah, 2021). Kamus umum Bahasa Indonesia mengartikan desa sebagai kumpulan rumah tangga yang seorang kepala desanya menjabat sebagai kepala pemerintahan desa. Rumah di luar kota juga termasuk dalam pengertian desa. Pemerintahan yang terpadu, khususnya di daerah pedesaan, adalah pemerintahan yang dengan cepat meningkatkan standar pembangunan dan membangun infrastruktur desa untuk kepentingan masyarakat (Darma et al., 2021).

Kewenangan yang diberikan kepada desa untuk membentuk dan mengurus rumah tangganya sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini dilakukan sesuai dengan undang-undang, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi dan ciri khas pemerintahan otonom setiap desa. Meskipun daerah diakui sebagai kesatuan masyarakat yang diakui secara hukum dan mempunyai batas-batas yang jelas, otonomi adalah kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengawasi dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan

masyarakat setempat dalam batas-batas Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan.bpk.go.id, 2014).

Untuk memperjelas peran dan tanggung jawab serta mempertegas status desa sebagai sasaran pembangunan, dimana tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan memajukan kesejahteraan masyarakat luas. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Pembangunan desa meliputi kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan, dan pengawasan (Suhu et al., 2022). Menurut Soetomo dalam (Erni, 2023), tujuan akhir pembangunan pada umumnya dan pembangunan pedesaan pada khususnya adalah meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat pedesaan. Mendorong masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya sebaik-baiknya dalam rangka menyeimbangkan pembangunan antara desa dan kota untuk kepentingan Negara, itulah yang dimaksud dengan pemberian otonomi daerah secara penuh.

Menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta melaksanakan ketertiban dalam Negeri. Kesejahteraan masyarakat merupakan fokus utama pembangunan suatu bangsa (Anita et al., 2024).

Meningkatkan kualitas hidup bangsa dan masyarakat adalah tujuan pembangunan desa. Pembangunan infrastruktur desa penting bagi pembangunan nasional dan daerah karena berdampak langsung pada kepentingan sebagian besar penduduk pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dan mencakup unsur pemerataan pembangunan (Mafturrahman et al., 2024). Aspek penting lainnya dalam pertumbuhan nasional adalah pembangunan desa. Prioritas pembangunan umumnya ditentukan oleh pemerintah pusat dengan menggunakan informasi dan analisis yang mereka teliti. Namun, tujuan-tujuan ini mungkin tidak selalu sesuai atau mewakili kebutuhan masyarakat desa secara akurat.

Desa-desanya yang menerapkan pembangunan desa berkelanjutan akan tumbuh ke segala arah, terutama dalam hal infrastruktur yang sangat penting bagi

masyarakat pedesaan. Pada hakikatnya, keuangan desa tidak hanya dimaksudkan untuk pembangunan infrastruktur, namun untuk menjamin pemerataan pembangunan, maka sangat penting untuk mempertimbangkan dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, pembangunan merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah untuk melaksanakan beberapa janji politik yang dibuat dalam berbagai situasi dalam pemilihan pejabat daerah dan legislatif. Siagian menyatakan bahwa jika setiap warga masyarakat berkomitmen untuk berperan sebagai actor pembangunan dan anggota masyarakat lainnya ikut berperan sebagai mentor, pengarah, dan panutan, maka keberhasilan pembangunan infrastruktur akan lebih terjamin dan dapat memberikan motivasi (Rusdi et al., 2020).

Pembangunan desa meliputi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Membangun jalan ramah lingkungan, atau sarana transportasi darat lainnya. Menurut Sasmito, membangun infrastruktur jalan merupakan cara paling mendasar untuk mengefektifkan distribusi komoditas dan jaringan transportasi manusia. Kessa melanjutkan, pengertian jalan raya lingkungan adalah jalan umum dengan kecepatan rata-rata rendah dan jarak tempuh pendek yang dimaksudkan untuk mendukung transportasi ramah lingkungan. Salah satu aspek pembangunan infrastruktur desa yang berbasis masyarakat adalah penciptaan jalan ramah lingkungan, dimana jalan dan jalur lingkungan digunakan oleh warga untuk mobilitas dan interaksi sosial (Rini et al., 2021).

Dana pembangunan berasal dari Bantuan Provinsi (BANPROV) dan Dana Desa (DD) yang bersumber langsung dari pemerintah federal. Sedangkan pendapatan desa atau gaji resmi dibayarkan dari Anggaran Dana Desa (ADD) yang ditransfer dari pemerintah kabupaten. Keuangan desa meliputi anggaran keuangan Negara yang bersumber dari alokasi pendapatan pajak daerah serta uang imbalan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. APBD Kabupaten/Kota memberikan pengertian Alokasi Dana Desa yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 18. Kabupaten/Kota menerima paling sedikit 10% dari perimbangan keuangan pusat dan daerah dana untuk desa.

Pengalokasian dana desa kepada kabupaten/kota didasarkan pada jumlah desa, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa digunakan untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan prioritas utama. (Purba, 2024)

Pengelolaan dana desa harus transparan sehingga tidak ada penyelewengan dan disalurkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, yang dilakukan melalui musrenbang yang bertujuan untuk memberikan masyarakat gambaran tentang cara dana desa dikelola sehingga rencana pembangunan yang akan dilaksanakan didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, perencanaan berarti mengumpulkan pendapat, ide, atau gagasan dari masyarakat. selanjutnya, pengelolaan mencakup cara penggunaan dana desa yang diharapkan melibatkan masyarakat dengan tujuan memberikan kepercayaan kepada masyarakat desa untuk mengelola proyek yang bersumber dari APBN melalui mekanisme swakelola. Kemudian dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk mencegah kebocoran anggaran dan penyimpangan. Namun, pemantauan dan evaluasi tidak cukup jika hanya dilakukan secara sederhana (Nathania & Siringo-ringo, 2021).

Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan sangat berkaitan dengan pemafaatan dana desa sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil. Masyarakat desa dibantu oleh dana desa (Purwadinata et al., 2024).

Dana desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang khusus diperuntukkan bagi Desa. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pengembangan masyarakat, penyelenggaraan pemeritahan, dan pelaksanaan program. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menjadi landasan program pemberdayaan informasi ini (Peraturan.bpk.go.id, 2020).

Menurut Mulyani, Peraturan Menteri tersebut lebih lanjut mengatur bahwa dana desa harus digunakan untuk proyek dan kegiatan lokal yang memberdayakan masyarakat desa dan mendorong pembangunan desa. Prinsip-prinsip berikut ini mendasari prioritas penggunaan dana desa: pertama, keadilan, yaitu memberikan

prioritas yang sama bagi semua orang, hak dan kepentingan penduduk; dan kedua, prioritas kebutuhan, yang mengutamakan kepentingan desa yang lebih mendesak, esensial, dan berkaitan erat dengan keinginan sebagian besar masyarakat desa.

Menurut Nurcahaya (2021), pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia. Hal ini juga mencakup program dan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki agar masyarakat mampu menghidupi dirinya sendiri secara mandiri. Dampaknya, pendapatan ekonomi desa akan meningkat. Ketersediaan keuangan desa diharapkan dapat mendorong pembangunan daerah karena pemerintah desa menerima dana belanja modal untuk pembangunan (Waworuntu et al., 2022).

Bidang prioritas penggunaan keuangan desa adalah pembangunan desa, yang mencakup pemeliharaan kesejahteraan sosial dan infrastruktur, usaha ekonomi dan pendidikan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kewirausahaan. Rapat desa menetapkan skala prioritas pemanfaatan dana desa dengan memperhatikan tipologi desa sesuai dengan tingkat pembangunan desa (Darmanto et al., 2023).

Peran masyarakat sangat penting dalam penyiapan awal pengalokasian dana, karena tujuan penggunaan alokasi dana desa adalah untuk kepentingan masyarakat dan harus ditangani oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan perencanaan yang akan dilakukan secara alami dengan keterlibatan seluruh masyarakat (Dedi & Ismail, 2018).

Desa Nanggela adalah salah satu desa yang merupakan bagian dari Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon, yang memiliki luas wilayah terdaftar 313,3 Ha dan jumlah penduduk 4.210 jiwa. Desa Nanggela adalah salah satu desa yang cukup berkembang di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon. Ada empat dusun berbeda di Desa Nanggela, yaitu: Dusun Cibungur, Dusun Cikaramat, Dusun Pakuwon, dan Dusun Dukuhsari. Salah satu desa penerima bantuan Dana Desa yang ditrasfer dari APBN pada Tahun 2022 adalah Desa Nanggela. Pemerintah desa bertugas mengelola dana yang berjumlah Rp627.231.650 untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, dan Rp937.689.560 untuk konstruksi.

Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan akan menyalurkan langsung dana yang diperuntukkan bagi pembangunan desa melalui transfer daerah Kabupaten ke Desa, sesuai dengan amanah pemerintah pusat untuk mengucurkan dana pembangunan desa kepada kepala desa. Kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa, dan perangkat desa lainnya akan mengawasi pengelolaannya setelah sampai di desa untuk memutuskan perencanaan, pelaksanaan, dan tanggung jawab. Tujuan utama dana desa ini diharapkan adalah program pembangunan dan pemberdayaan. Pemerintah desa mempunyai peran penting dalam memastikan alokasi dana yang tepat, khususnya untuk pembangunan, pemanfaatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Mengingat hal tersebut, peran Kepala Desa sangat penting karena Kepala Desa diberi wewenang oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola dan menggunakan dana desa yang diberikan kepada desa yang dipimpinnya, dengan tujuan akhir untuk memajukan desa. Selain itu, Pasal 26 Ayat (1) secara jelas menguraikan empat tanggung jawab utama Kepala Desa, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembentukan pemerintah desa;
- b. Mengelola pembangunan desa;
- c. Pengelolaan pengembangan masyarakat desa; dan
- d. Mendorong masyarakat desa untuk mengambil tindakan;

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu sifat Nabi Muhammad SAW adalah amanah yang diberikan kepada kepala desa yang mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Amanah adalah sebutan untuk seseorang yang dapat dipercaya. Yang terdapat dalam Qs. Al-Ma'arij ayat 32, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya: “ Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”.

Oleh karena itu, mengingat hal ini sangat penting bagi tingkat desa untuk memiliki pemimpin yang mampu dan dapat dipercaya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam rencana mereka, yang pada gilirannya akan menumbuhkan profesionalisme di tempat kerja dan kemampuan untuk mengantisipasi dan beradaptasi terhadap tantangan di masa depan. Kepala desa yang menjunjung tinggi tugas yang diberikan pemerintah dan adil terhadap masyarakatnya, tidak

menyესatkan masyarakat atau wakil pemerintah desa tentang bagaimana dana desa dikelola untuk kepentingan masyarakat.

Desa Nanggela memiliki luas lahan non persawahan sebesar 260 Ha dan luas sawah sebesar 53,3 Ha, berdasarkan data pemanfaatan wilayah desa. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Nanggela bermata pencaharian sebagai pekerja sehari-hari dan berwirausaha, dimana merekayang bekerja sebagai buruh harian lepas yang pekerjaannya berbeda-beda dalam hal waktu dan volume pekerjaan, serta wirausahawan yang memiliki dan menjalankan usahanya sendiri, memberikan sebagian besar pendapatan atau kegiatan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah harus menciptakan fasilitas yang dapat memudahkan aktivitas sehari-hari masyarakat sebagai pemilik usaha dan tugas sehari-hari sebagai kontraktor independen dan pemilik usaha, serta mendukung perekonomian lokal dengan membangun jalan sesuai fungsional yang menghubungkan ke daerah-daerah dimana masyarakat bekerja.

Dalam hal ini, pembangunan infrastruktur jalan desa dapat membantu aktivitas masyarakat sehari-hari. Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh pengelolaan Dana Desa dan manfaatnya bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur jalan ini, karena mereka menilai pembangunan jalan Desa Nanggela telah mencapai potensi yang maksimal. Meski konstruksi sudah dilakukan, namun beberapa permukaan jalan licin dan rusak akibat hujan. Salah satunya para petani yang memanfaatkan jalan sebagai jalur bercocok tanam untuk menuju atau keluar dari ladangnya. Oleh karena itu, penulis bereinginan untuk melakukan penelitian dalam hal ini dengan judul **“Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Nanggela Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon)”**.

B. Perumusan Masalah

1) Identifikasi Masalah

Berdasarkan informasi latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka jenis permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

- a) Adanya kesenjangan antara prioritas pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat desa. Prioritas pembangunan yang ditetapkan

oleh pemerintah pusat terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat desa.

- b) Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur jalan sudah sepenuhnya direalisasikan. Namun masih ada jalan yang perlu diperbaiki kembali, karena ada kendala berupa keterbatasan dana.

2) Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan agar penelitian tetap fokus dan memperlancar pembahasan, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan penelitian. Pembatasan masalah juga digunakan untuk mencegah atau memperluas masalah lainnya. Mengenai kendala permasalahan yang diteliti, yaitu terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan, maka peneliti membatasi cakupan topik dalam penelitian ini hanya pada “Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Nanggela Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon)”.

3) Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini, sebagai berikut:

- a) Bagaimana mekanisme pengelolaan alokasi dana desa?
- b) Apa manfaat langsung dan manfaat tidak langsung dari pembangunan infrastruktur jalan terhadap kesejahteraan masyarakat?

4) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisis mekanisme pengelolaan alokasi dana desa.
- b) Untuk menganalisis manfaat langsung dan manfaat tidak langsung dari pembangunan infrastruktur jalan terhadap kesejahteraan masyarakat.

C. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini, yaitu:

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan kita di bidang ini dan meningkatkan pemahaman kita tentang pengelolaan

dana desa dan manfaatnya bagi masyarakat melalui pengembangan infrastruktur jalan.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Dari penelitian ini dapat menjadi pembelajaran bagi penulis mengenai pertumbuhan dana desa dan program pemerintah yang memanfaatkannya untuk memberi manfaat bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, seperti jalan desa yang meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.

2. Bagi Masyarakat Desa

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat memberikan informasi yang baik kepada pemerintah Desa Nanggela, sehingga desa dapat menggunakan dananya untuk membangun jalan dan fasilitas lainnya, sehingga dapat memajukan masyarakat.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, langkah awal yang harus dilakukan yaitu mengkaji penelitian terdahulu yang relevan yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam membandingkan suatu penelitian untuk menghindari adanya kesamaan dalam sebuah penelitian serta menganalisis letak perbedaannya.

1) Penelitian yang dilakukan oleh Shendik Widiyanto (2020), “**Optimalisasi Alokasi Dana Desa Pada Pembangunan Infrastruktur Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberdadap**”.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengalokasian dana desa untuk pembangunan infrastruktur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sumberdadap, dan mendeskripsikan factor-faktor yang mendorong serta menghambat pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sumberdadap. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dimana untuk penggalan data dilakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan proses pengalokasian dana desa yang meliputi pengelolaan keuangan desa sudah berjalan dengan baik, transparan dan

sudah sesuai dengan prosedur, dan tujuan pemerintahan desa sumberdapat untuk mensejahterakan masyarakatnya sudah sesuai dengan realitanya. Masyarakat desa juga merasakan dampak positif dari pembangunan tersebut. Namun, pemerintah desa kurang baik dalam menetapkan waktu pembangunan, dimana pembangunan dilakukan pada waktu musim hujan. Perbedaan penelitian ini yaitu dilihat dari tempat penelitian dan fokus penelitian yang ditetapkan, dimana dalam penelitian ini memfokuskan pada manfaat yang dirasakan langsung dan manfaat tidak langsung dari pembangunan infrastruktur jalan.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Beatrice Nathania dan Eko Deswin Miechaels Siringo-Ringo (2021), “ **Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Pamatang Sahkuda sudah berjalan dengan baik, sehingga hasil pengelolaan dana desa juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan efektif bagi masyarakat. Keberhasilan tersebut tidak dapat dipungkiri karena adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, baik dalam merencanakan prioritas penggunaan dana desa, melaksanakan dana desa atau mengawasi pengerjaan proyek dan hasil proyek dana desa.
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Putri Esther Haloho, Hanny Purnamasari, dan Lina Aryani (2022), “**Strategi Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dengan menggunakan teori salusu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Serta data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data

primer. Hasil dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Desa dalam peningkatan pembangunan infrastruktur di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dapat dinilai dari lima dimensi yaitu tujuan dan sarana, lingkungan, kemampuan internal, pembuat strategi dan komunikasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu fokus penelitian pada strategi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, sedangkan pada penelitian ini fokus pada manfaat yang dirasakan warga terhadap pembangunan infrastruktur jalan.

- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Teki Pangalo, Debby. Ch. Rotinsulu, Steeva Y. Tumangkeng (2020), "**Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud**". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pemanfaatan Dana Desa serta bagaimana dampaknya secara langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder dana desa tahun 2015 sampai 2017 dan data primer diambil secara langsung melalui kuesioner. Dan analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa yang ada di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud secara efektif dengan nilai diatas 100% yang menyatakan bahwa dana desa memiliki tingkat efektivitas serta memiliki dampak yang positif secara langsung kepada masyarakat di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian serta metode yang digunakan.
- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Subhan Purwadinata, Ahmad Zaenal Wafiq, dan Iwan Harsono (2024), "**Pemanfaatan Dana Desa Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa dari Perspektif Keuangan Daerah**". Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki tentang pemanfaatan dana desa dilaksanakan di tingkat desa, dampak pemanfaatan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan implikasi pemanfaatan dana desa terhadap keuangan daerah. Metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa mempunyai potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, asalkan pengelolaannya dilakukan secara optimal dan didukung oleh kebijakan yang tepat.

- 6) Penelitian yang dilakukan Andi Ashar dan Andi Agustang (2020), “**Dampak Sosial Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kalola, Kecamatan Maniampajo Kabupaten Wajo**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana desa dan dampak sosial desa dalam kesejahteraan masyarakat di Desa Kalola. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik menentukan informan dengan menggunakan cara purposive sampling atau pengambilan data dengan menentukan kriteria informan yakni masyarakat desa Kalola yang telah bermukim sebelum dan sesudah adanya dana desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama: pemanfaatan dana desa di desa kalola terbagi dua, yakni pemanfaatan melalui pembangunan fisik dan pemanfaatan melalui pemberdayaan masyarakat. Pembangunan fisik meliputi pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan fisik 70%, sedangkan pemberdayaan masyarakat 30%. Kedua, dampak sosial dana desa dalam kesejahteraan masyarakat terbagi dua yakni positif dan negative. Dampak positif dimana masyarakat mudah mengakses jalan menuju ke area persawahan, masyarakat miskin sudah merasa tercukupi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, masyarakat desa memiliki keterampilan. Sedangkan dampak negative yaitu timbulnya konflik antara warga, terkikisnya integrasi diantara masyarakat, masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi, adanya kriminalitas yang terjadi di desa. Perbedaan pada penelitian ini yaitu dalam penelitian terdahulu fokus

pada dampak yang dihasilkan seperti dampak langsung dan dampak tidak langsung, sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitian pada manfaat langsung dan manfaat tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat desa.

- 7) Penelitian yang dilakukan oleh Reno Firdaus, Prayugo, dan Nurul Huda (2020), “ **Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Ulu Pulau**”. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa didominasi oleh sektor pembangunan desa seperti pembangunan jalan perkebunan, pembangunan jembatan, bangunan PAUD dan LPTQ. Sementara pada sektor pemberdayaan masyarakat berupa bantuan keagamaan, bantuan gaji guru PAUD, kegiatan PKK dan bantuan rumah keagamaan. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu objek penelitian dan tempat penelitian.
- 8) Penelitian yang dilakukan oleh Rini Mastuti, Abdul Chalik, Toti Sindra Kurniawan, dan Natasha (2021), “ **Dampak Pembangunan Jalan Desa Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembangunan infrastruktur jalan terhadap perubahan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, observasi dan studi pustaka. Analisis penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Desa Simpang Empat merupakan program revitalisasi fungsi transportasi yang dilakukan sesuai standar kementerian PUPR. Pelaksanaan proyek pembangunan fisik jalan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai tenaga kerja dengan menggunakan sumber daya setempat. Pembangunan jalan tersebut memberikan dampak yang positif terhadap perubahan kondisi sosial masyarakat. Perbedaan penelitian terletak pada judul, tempat dan metode pengumpulan data, dimana pada penelitian terdahulu mengumpulkan data

menggunakan kuesioner, observasi dan studi pustaka, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

- 9) Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni Dwi Agvita Berutu, Riska Oktaini, Silvia Sugengni dan Maya Panorama (2022),” **Analisis Pembangunan Infrastruktur terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Sumatera Utara**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembangunan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi masyarakat pesisir sumatera utara. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literature. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa banyak infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah yang pada gilirannya telah membawa banyak manfaat yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing dalam bidang ketahanan pangan nasional dan pariwisata. Tentunya infrastruktur yang memadai di wilayah pesisir juga berdampak pada produktivitas ekonomi masyarakat sekitar yang juga mengalami peningkatan. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tempat penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian.
- 10) Penelitian yang dilakukan oleh Randi Darmawansyah, Syapsan dan Dahlan Tampubolon (2021), “ **Penggunaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau**”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan penggunaan dana desa bidang pelaksanaan pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat dan penggunaan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Penelitian ini merupakan penelitian semi kuantitatif. Populasi masyarakat desa sejumlah 8132 jiwa dan sampel yang diambil dengan menggunakan rumus sovini yaitu berjumlah 100 responden dengan teknik proporsional random sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, studi dokumen dan observasi. Data yang digunakan

yaitu data primer dengan menggunakan desain penelitian cross sectional. Penelitian ini menggunakan metode analisis korelasi spearman rank. Hasil analisis yang disimpulkan peneliti yaitu menyatakan bahwa pengalokasian dana desa bidang pembangunan infrastruktur memiliki hubungan positif dan signifikan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian dana desa bidang pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada metode yang digunakan dan lokasi tempat penelitian.

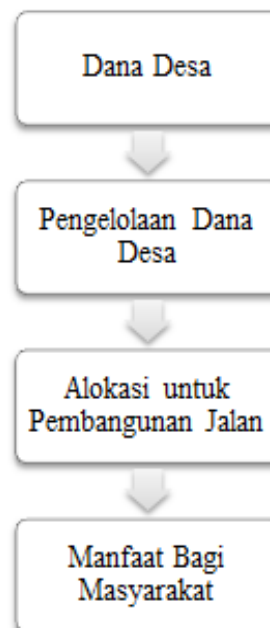
- 11) Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Kusmana dan Ismail (2018), **“Manfaat Alokasi Dana Desa bagi Pembangunan dan Masyarakat Desa”**. Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui lebih dalam tentang kemanfaatan dana dalam alokasi dana desa bagi pembangunan dan masyarakat desa. Penelitian ini dikaji dengan kajian pustaka, dengan pendekatan masalah, dimana penulis mengambil data-data dari buku bacaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan alokasi dana desa serta peranturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu menyatakan bahwa alokasi dana desa sangat bermanfaat bagi pembangunan desa dan masyarakat desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa sebaiknya dapat dilanjutkan di setiap tahunnya. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam metode penelitian yang dilakukan, dimana dalam penelitian terdahulu menggunakan kajian pustaka, sedangkan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif yang datanya diambil melalui wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian akan pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan sebagai upaya peningkatan masyarakat. Melalui pengalokasian dana desa diharapkan desa dapat menjalankan otonominya dengan sebaik-baiknya. Dimana tujuan dari dana desa sendiri adalah untuk memajukan perekonomian masyarakat, membatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat desa sebagai sumber pembangunan.

Oleh karena itu, diharapkan pemerintah memberikan perhatian lebih dari sekedar pengelolaan keuangan desa dan hasil akhir pembangunan desa dalam proses pembangunan. Untuk memastikan bahwa pembangunan yang dihasilkan berkualitas, pemerintah desa harus memprioritaskan pengembangan proses pembangunan berbasis masyarakat, karena hal ini akan memastikan bahwa pembangunan tersebut sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat desa.

Jalan merupakan alat yang sangat penting dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas bagi masyarakat pedesaan dan juga dapat berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian desa, sehingga pembangunan di setiap dusun perlu mendapat perhatian lebih. Namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jalan-jalan tertentu masih memerlukan perbaikan karena air hujan telah merusak beton.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah Peneliti pada Tanggal 30 Maret 2024

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa setiap desa menerima dana berupa dana desa, yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan desa. Penelitian yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan sebagai Upaya Peningkatan Masyarakat (Studi Pada Desa

Nanggela Kecamatan Gregeh Kabupaten Cirebon)” memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menjelaskan kerangka teorinya.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis induktif biasanya digunakan dan studi deskriptif dilakukan. Sugiyono (2017) menjelaskan penelitian kualitatif sebagai suatu metode yang digunakan untuk meneliti keadaan suatu hal yang alamiah. Triangulasi adalah metodologi yang digunakan untuk pengumpulan data, dan data yang diperoleh biasanya berupa data kualitatif, dengan pengolahan data induktif atau kualitatif.

Istilah kualitatif mengacu pada suatu pendekatan penelitian dimana seorang peneliti menggunakan mata dan telinga masyarakat sebagai alat untuk mengumpulkan, mengatur, dan menafsirkan data. Wawancara tatap muka dan observasi terhadap orang-orang di dunia nyata, dunia maya, dan konteks sosial sering kali digunakan dalam penelitian kualitatif.

Oleh karena itu, dengan mengkaji pembangunan infrastruktur jalan, peneliti ingin mengetahui pengelolaan dana desa dan manfaatnya bagi masyarakat.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menurut Sugiyono (2017), adalah suatu lokasi atau kawasan yang dijadikan sebagai subjek atau tujuan penyelidikan. Lokasi penelitian dipilih dengan mempertimbangkan latar belakang tujuan dan permasalahan penelitian. Setiap proyek penelitian harus dimulai dengan mengidentifikasi lokasi penelitian karena hal ini akan memudahkan upaya penelitian penulis.

Oleh karena itu, Desa Nanggela di Kecamatan Gregeh Kabupaten Cirebon dijadikan sebagai lokasi penelitian.

3) Sasaran dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, berikut ini yang menjadi sasaran informan dalam penelitian ini:

- a) Kepala Desa, karena dapat memberikan informasi rinci tentang segala hal yang berkaitan dengan dana desa yang digunakan untuk pembangunan jalan, serta manfaat pembangunan tersebut bagi masyarakat.
- b) Sekretaris Desa menjadi informan kedua, karena bertugas menyusun rencana pembangunan infrastruktur jalan desa.
- c) Bendahara Desa, yang bertugas mengawasi pengeluaran pembangunan menjadi informan yang ketiga.
- d) Informasi yang diminta berkaitan dengan pandangan atau pendapat masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur khususnya jalan di Desa Nanggela, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon. Maka informan keempat adalah masyarakat desa.

Penelitian ini akan memakan waktu enam bulan untuk diselesaikan, mulai dari bulan Januari 2024 hingga bulan Juni 2024.

4) Sumber Data

Sumber data adalah subjek yang mengumpulkan informasi data untuk menilai kelayakan dan kebenaran penelitian. Selain itu, data adalah pengelompokan informasi yang dikumpulkan melalui pengukuran, penyelidikan, atau observasi; data kualitatif disisi lain mengacu pada informasi yang menggambarkan suatu fenomena dan mencakup opini, persepsi, dan penilaian.

Dua jenis data berbeda digunakan dalam penelitian ini, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono (2016), Data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui kajian atau pengumpulan data secara langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah rekaman lapangan dan hasil wawancara bersama kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan beberapa masyarakat setempat lainnya.

b) Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016), Data sekunder adalah catatan-catatan yang telah ada dan khusus diperoleh peneliti untuk memenuhi

kebutuhan informasi dalam penelitian ini sebagai acuan sumber. Contoh pencatatan ini mencakup penggunaan keuangan daerah dalam catatan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

5) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, informasi dikumpulkan secara terus-menerus hingga diperoleh informasi lengkap dari berbagai sumber dan melalui berbagai metode pengumpulan data (triangulasi). Oleh karena itu, berikut adalah cara-cara untuk memperoleh strategi pengumpulan data agar diperoleh data yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan:

a) Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.

Untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dan dapat diandalkan, wawancara mendalam yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan pertanyaan terbuka dibandingkan dengan wawancara yang dilakukan dalam suasana formal.

Adapun konteks untuk melakukan wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1.1
Informan Penelitian

| Informan | Jumlah(Orang) | Keterangan |
|-----------------|----------------------|--|
| Kepala Desa | 1 | Terkait dengan penggunaan dana desa dalam pembangunan, dampak yang dihasilkan serta kendala yang dihadapi dalam pembangunan jalan. |
| Bendahara Desa | 1 | Terkait dengan besaran anggaran penggunaan dana desa dalam pembangunan. |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Sekretariat Desa | 1 | Terkait dengan rencana pembangunan jalan di Desa. |
| BPD | 1 | Terkait dengan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD. |
| Masyarakat/Warga Desa | 2 | Terkait pendapat atau sudut pandang masyarakat mengenai kebutuhan infrastruktur jalan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta penilaian mereka terkait kualitas dan manfaat infrastruktur jalan yang telah dibangun. |

b) Observasi

Observasi pada hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Strategi ini memungkinkan dilakukannya pengamatan langsung terhadap situasi di lapangan serta proses yang terlibat dalam pemberian dana masyarakat untuk pembangunan infrastruktur.

c) Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Pendekatan ini merupakan teknik pengumpulan data untuk menelusuri data historis. Gambar atau catatan yang diserahkan pada saat dana desa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan menjadi dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini.

6) Metode Analisis Data

Dalam sebuah penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan pengumpulan data yang bermacam-macam hingga mencapai titik maksimal yang disebut juga titik jenuh. Selain itu, analisis data kualitatif adalah teknik yang

digunakan untuk mengolah data non-numerik untuk menghasilkan informasi yang tidak ambigu.

Bogdan dalam (Sugiyono,2018) menyatakan analisis data dalam penelitian kualitatif adalah suatu prosedur metodologis yang melibatkan dan mengumpulkan informasi dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain yang mudah dipahami.

Sugiyono menguraikan tiga metode interaktif dalam analisis data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Untuk sampai pada temuan, prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini meliputi triangulasi hasil analisis data, reduksi jumlah data, penyajian data, dan melakukan wawancara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode analisis ini konsisten dengan penelitian yang disebutkan. Maka dapat disimpulkan bahwa teknik analisis ini sesuai dengan penelitian ini yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan sebagai Upaya Peningkatan Masyarakat (Studi pada Desa Nanggela Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon)”.

7) Validasi Data

Proses pemeriksaan, perbandingan, dan konfirmasi data yang digunakan dalam pengambilan keputusan disebut validasi data. Memastikan legitimasi dan keakuratan data yang digunakan adalah tujuannya.

Prosedur triangulasi untuk validasi data digunakan dalam pengujian kredibilitas penelitian ini yang merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengingatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

Triangulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk menilai kredibilitas data, diantaranya:

- a) Triangulasi Sumber, yaitu teknik dalam metode penelitian yang melibatkan verifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber data, antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi.

- b) Triangulasi dengan Teknik atau Metode, yaitu membandingkan dan mengecek ulang data dari sumber yang sama tetapi menggunakan beberapa teknik, seperti analisis isi dokumen dan wawancara dengan berbagai sumber untuk menjamin keakuratan data.
- c) Triangulasi dengan Waktu, metode ini melibatkan verifikasi data dengan menggunakan wawancara, observasi, atau metode lain dalam berbagai kondisi dan waktu. Hal ini diulangi hingga tercapai tingkat kepercayaan antara informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Penelitian ini dilakukan pada pagi, siang, dan sore hari.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika pada penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI, Pada bab ini menguraikan tentang Pengertian Desa, Manfaat Dana Desa, Mekanisme Pengelolaan Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Dana Desa, dan Pembangunan Infrastruktur.

BAB III KONDISI OBJEKTIF, Pada bab ini berisi tentang Sejarah Desa Nanggela Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon, Lokasi Geografis, Visi dan Misi Desa Nanggela Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon, Sarana dan Prasarana Desa, Struktur Organisasi Desa Nanggela, serta tugas pokok masing-masing perangkat Desa.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini berisi tentang hasil dari penelitian pada Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

BAB V PENUTUP, Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dari pembahasan pada bab sebelumnya, dan saran dari peneliti atas hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.